

Pengaruh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Di Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai)

Rizky Maulana¹ Nurmasari²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,

Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

Email: rizkymaulana123@student.uir.ac.id nurmasari@soc.uir.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the extent of the supervision carried out by the Department of Environment and Sanitation (DLHK) of Pekanbaru City on the distribution of Temporary Waste Disposal Sites (TPS), particularly in Marpoyan Damai District. The research uses supervision indicators including procedures, standards, accuracy, performance measurement, and corrective actions. A quantitative approach was employed, with data collection conducted through interviews and direct interaction at the research site. This research is categorized as a descriptive survey, prioritizing questionnaires and interview guides as primary tools for data collection. The gathered data was then used to describe the actual conditions in accordance with the research objectives. The study focuses on measuring the effectiveness of DLHK's oversight in regulating TPS distribution, considering that supervision plays a crucial role in ensuring programs are implemented as intended. Based on the analysis, it is concluded that the level of supervision by DLHK Pekanbaru on TPS distribution in Marpoyan Damai District falls into the category of moderately implemented.

Keywords: Supervision, Distribution of Temporary Waste Shelters (TPS)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru berpengaruh terhadap penyebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Penelitian ini menggunakan indikator pengawasan berupa prosedur, standar kerja, ketelitian, evaluasi kinerja, dan tindakan perbaikan. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan interaksi langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini tergolong dalam jenis survei deskriptif yang mengandalkan kuesioner dan panduan wawancara sebagai alat utama untuk memperoleh data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana efektivitas pengawasan DLHK dalam mengatur distribusi TPS di wilayah yang diteliti, mengingat pengawasan merupakan unsur penting dalam menjamin pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru terhadap sebaran TPS di Kecamatan Marpoyan Damai berada pada kategori cukup terlaksana.

Kata Kunci: Pengawasan, Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Pendahuluan

Lingkungan yang sehat merupakan hal yang paling penting bagi tumbuh dan berkembangnya bagi setiap makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini, makhluk hidup merupakan aset penting bagi kemajuan bumi dimasa mendatang, dan tak kalah penting adalah makhluk yang bernama manusia, karena manusia tidak akan pernah terpisahkan dengan alam dan lingkungan.

Manusia juga punya tugas penting dalam kemajuan serta melestarikan alam dimasa yang akan datang, karena tanpa adanya kerja sama manusia di dalamnya untuk melakukan pelestarian, penataan serta perawatan dengan baik, maka lingkungan dan alam akan langka bahkan terancam kepunahan dipermukaan bumi dimasa mendatang.

Penataan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat kita kenal sebagai administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Nawawi (dalam Syafiie, 2003:5), administrasi merupakan serangkaian aktivitas yang berfungsi sebagai proses mengatur dan mengendalikan kerja sama dalam suatu kelompok, agar tujuan bersama yang telah disepakati sebelumnya dapat tercapai dengan baik.

Dalam upaya menata serta menjaga kelestarian lingkungan, sudah menjadi pemahaman umum bahwa manusia tidak dapat bekerja atau menjalankan segala sesuatu secara individual. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan kehadiran dan partisipasi pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dan interaksi antarmanusia inilah yang menjadi dasar terbentuknya organisasi.

Sejalan dengan itu, Barnard (dalam Syafiie, 2003:114) menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih, yang bersifat non-material dan tidak diskriminatif, serta berfokus pada aspek hubungan sosial antarindividu. Dengan kata lain, organisasi lahir dari semangat kebersamaan dan interaksi yang harmonis.

Dalam setiap organisasi, tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan suatu metode atau pendekatan yang terstruktur. Di sinilah peran manajemen menjadi sangat penting. Haiman (dalam Zulkifli & Nurmasari, 2015:5) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu fungsi untuk mencapai tujuan melalui aktivitas orang lain, dengan cara mengarahkan dan mengawasi upaya-upaya individu dalam suatu sistem kerja yang terorganisasi.

Seperti yang dijelaskan diatas, setiap kegiatan yang di buat oleh organisasi memerlukan suatu pengawasan dari pejabat yang berwenang yang mana pengawasan tersebut menurut Siagian (2003; 112) menyatakan Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya

Sama halnya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjaga lingkungan masyarakat tetap sehat dan terhindar penyakit, maka pemerintah kota pekanbaru membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah agar lingkungan tetap bersih dan terhindar dari penyakit, dalam hal ini Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup (DLHK) yang diberi amanah dalam melakukan pengawasan terhadap TPS yang ada di Kota Pekanbaru terkhusus di Kec. Marpoyan Damai.

Kesehatan merupakan aspek esensial dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjadi modal dasar bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Tanpa adanya kesehatan yang memadai, pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh dan utuh tidak akan dapat terlaksana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat, sehingga derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat tercapai.

Maka dari itu persoalan lingkungan ini menjadi hal yang fundamental dan urgen bagi setiap orang, bukan saja dari masyarakat bahkan peran serta pemerintah juga seharusnya ikut andil dalam membuat suatu aturan yang mengikat bagi setiap orang agar semua orang ikut serta

menjaga lingkungan melalui kebijakan yang di ambil untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Berbicara mengenai kebijakan ini maka jangan sampai melupakan bahwa suatu kebijakan itu perlu adanya pengawasan dari pejabat yang berwenang yang ditujukan untuk mengawasi kebijakan tersebut, menurut Terry pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilakukan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. dalam Moris dan Zulkifli (2014;134). Begitu juga pemerintah kota pekanbaru dalam menjaga lingkungan masyarakat tetap sehat dan terhindar dari sampah serta penyakit akibat lingkungan yang kumuh, sebagai mana yang kita ketahui jika sesuatu itu di letakkan pada tempatnya maka dia akan nampak teratur dan sejuk dipandang mata, begitu juga dengan sampah jika tidak diletakkan pada tempat pembuangan sampah maka dia akan nampak tak rapi bahkan bisa berceceran dimana-mana, sehingga menimbulkan bauk tidak sedap, jika dia dibuang diparit, paritnya tersubumbat, jika dibuang di sungai sungai akan tercemar dan banyak efek lain jika sampah ini tidak di buang pada Tempat Penampungan Sementara (TPS), maka pemerintah membuat aturan terkait pengolahan sampah, supaya lingkungan tetap bersih dan tidak ada oknum yang membuang sampah sembarangan terkusus di Kec. Marpoyan Damai.

Berdasarkan pra penelitian diatas, Masalah yang diperoleh yaitu:

1. Masalah Sampah yang Menumpuk di Ruas Jalan

Penulis mengamati bahwa hampir di setiap ruas jalan utama maupun lingkungan permukiman di Kecamatan Marpoyan Damai ditemukan tumpukan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Marpoyan Damai tercatat sebagai wilayah dengan jumlah TPS ilegal terbanyak kedua dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir. Fakta ini mencerminkan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, serta adanya pola perilaku yang belum berubah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

2. Kurangnya Penegakan Aturan dan Pengawasan

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap keberadaan TPS ilegal maupun pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan. Salah satu mekanisme penegakan aturan tersebut adalah dengan membentuk tim yustisi yang bertugas memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, upaya penindakan ini belum berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa adanya sanksi tegas, karena minimnya pengawasan dari petugas yang berwenang di lapangan.

3. Minimnya Sosialisasi tentang TPS Resmi

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 59 ayat (2) huruf a dan b, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap keberadaan TPS ilegal maupun pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan. Salah satu mekanisme penegakan aturan tersebut adalah dengan membentuk tim yustisi yang bertugas memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, upaya penindakan ini belum berjalan secara optimal. Masih banyak masyarakat

yang membuang sampah sembarangan tanpa adanya sanksi tegas, karena minimnya pengawasan dari petugas yang berwenang di lapangan.

Tinjauan Pustaka

Kata "pengawasan" berasal dari kata dasar "awas", yang berarti menjaga atau mengamati. Dalam konteks manajemen dan administrasi, pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry (dalam Amiruddin, 2017:12) mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menentukan apa yang harus dilakukan, menilai pelaksanaannya, dan jika diperlukan, mengambil tindakan korektif agar pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan rencana.

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli, 2014:134), pengawasan berperan dalam mengevaluasi aktivitas yang telah dilakukan dan melakukan koreksi bila diperlukan, guna menjamin tercapainya hasil yang sudah dirancang. Sementara itu, Firman (2019:8) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu proses sistematis yang menetapkan standar kinerja sejak tahap perencanaan, menyusun sistem umpan balik, membandingkan hasil aktual dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dan mengambil langkah koreksi agar semua sumber daya dimanfaatkan secara efisien dan efektif demi mencapai tujuan.

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Inspektorat Daerah Buleleng (2016), yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan langkah sistematis untuk menetapkan standar, merancang sistem informasi balik, mengevaluasi kinerja, serta menentukan tindakan korektif untuk menjamin penggunaan sumber daya secara maksimal dalam mencapai sasaran organisasi.

Winardi (dalam Djadjuli, 2017:567) menyatakan bahwa pengawasan adalah segala aktivitas yang dilakukan manajer untuk memastikan hasil nyata sesuai dengan yang direncanakan. Basu Swastha menambahkan bahwa pengawasan merupakan fungsi yang menjamin tercapainya hasil sesuai harapan. Komaruddin pun berpendapat serupa, bahwa pengawasan merupakan kegiatan membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan awal, sekaligus memperbaiki penyimpangan yang muncul.

Iswandir (2015:68) menjelaskan bahwa pengawasan bertujuan menjamin pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara pengawasan dengan perencanaan. Sementara Arsyad (2002:20) menyebutkan bahwa pengawasan digunakan untuk mengukur hasil terhadap rencana, memberikan penghargaan pada staf yang berprestasi, serta merancang ulang hal-hal yang belum maksimal.

Menurut Siagian (2003:112), pengawasan adalah proses memonitor pelaksanaan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Pandangan Mockler (dalam Siswanto, 2013:139) menekankan bahwa pengawasan merupakan upaya sistematis dalam menetapkan standar, menyusun sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar, serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Mockler (dalam Darwis, 2009:318) juga menguraikan bahwa pengawasan meliputi penetapan standar, perbandingan hasil aktual, analisis penyimpangan, dan pengambilan tindakan korektif demi keberhasilan tujuan organisasi. Pengawasan tidak hanya bertujuan mengevaluasi apakah pelaksanaan berjalan baik, tetapi juga mencakup tindakan korektif dan penyesuaian standar secara berkelanjutan.

Pengawasan pada hakikatnya difokuskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Melalui kegiatan pengawasan,

diharapkan proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai rencana, baik secara efektif maupun efisien. Fungsi pengawasan juga memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pekerjaan telah dijalankan. Selain itu, pengawasan mampu mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dilaksanakan serta mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaannya.

- a. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengawasan sangat berkaitan erat dengan fungsi aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, di mana istilah “pengawasan” dijabarkan dalam Pasal 59, yang mencakup lima aspek berikut: Pemantauan
- b. Penindakan
- c. Pengendalian
- d. Evaluasi, dan
- e. Pelaporan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada konsep pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko (2013:359), yang digunakan untuk menyusun indikator data operasional variabel, yang terdiri dari:

- a. Prosedur – pimpinan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh pegawai atau anggota.
- b. Standar – adanya tenggat waktu tertentu dalam penyelesaian pekerjaan.
- c. Ketelitian – terdapat tolok ukur terhadap kinerja pegawai.
- d. Pengukuran pekerjaan – dilakukannya evaluasi atas pekerjaan pegawai.
- e. Perbaikan – pimpinan memberikan koreksi terhadap hasil kerja yang belum sesuai.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan survei, yang bertujuan untuk menggambarkan situasi aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Peneliti melakukan pengumpulan data, mengelompokkannya, lalu menganalisis untuk memperoleh rumusan terhadap permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden di lokasi penelitian.

Populasi mengacu pada keseluruhan subjek penelitian, baik individu, peristiwa, maupun objek yang menjadi pusat perhatian studi. Menurut Cooper (dalam Sudaryono, 2017:165), populasi mencakup seluruh elemen yang dapat diteliti.

Sedangkan sampel, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (dalam Sudaryono, 2017:167), merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan. Sampel terdiri dari sejumlah anggota populasi yang dipilih secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel adalah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *incidental sampling* atau *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ isedental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila pandangan orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, dalam hal ini teknik pengambilan sampel yang menggunakan *sampling accidental* adalah terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 1 orang, Karyawan Bidang Pengelolaan Sampah dengan populasi 13 orang sedangkan sampel yang dijadikan responden 5 orang dan masyarakat jumlah populasi siapa saja yang bebetualan berada di dekat lokasi penelitian maka itu bisa dijadikan responden penelitian dengan jumlah responden sampel 34 orang masyarakat yang ada di Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur

Pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau anggotanya. Dalam suatu prosedur aturan yang dibuat untuk keberhasilan program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentu perlu langkah yang tepat untuk tercapainya suatu tujuan dari DLHK itu sendiri.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yaitu bapak Darussalam, S.IP.,M.IP beliau mengatakan *dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru berkewajiban melakukan pemantauan dan penindakan atas tempat pembuangan sampah sementara atas pengelolaan sampah dengan membentuk tim yustisi (tim yang bertugas melakukan penindakan terhadap oknum yang membuang sampah sembarangan), dan juga pemantauan ini dilakukan setiap minggu itu selalu biasanya ada yang memantau di setiap kecamatan bahkan sampai mereka ke gang2 kecil untuk melihat ada atau tidak tempat TPS ilegal yang di buat oleh oknum yang bertanggung jawab yang menyebabkan kotornya lingkungan masyarakat.*

Saat ini juga Sebagian TPS Resmi ditutup, karena sebagian masyarakat yang bukan penduduk asli disitu ikut membuang sampah tempat tersebut, sementara orang itu tidak ikut dalam membayar iuran sampah maka warga dan juga petugas DLHK menutup TPS tersebut.

Supaya sampah tidak melimpah di tempat yang tidak di inginkan maka pihak DLHK mengambil inisiatif sekarang melakukan proses pemungutan karena sampah langsung ke tiap-tiap rumah warga supaya mengurangi warga membuang sampah ke jalanan atau kuselokan atau drainase, sehingga tibanya dari pihak DLHK jemput bola lah jadinya supaya tidak ada lagi orang luar yang membuang sampah ke tempat tersebut, dan hak warga yang membayar iuran sampah pun terpenuhi, sehingga sekarang mobil sampah langsung membuang ke TPA, tanpa harus menumpuknya terlebih dahulu di TPS.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Darmawan, SE beliau mengatakan *dalam pemantauan secara langsung ini sering kali kita menemukan warga yang membuang sampah ke TPS yang tidak resmi namun untuk penindakannya saat ini belum biasa kami lakukan seperti denda dan hukum pidana, karena yang membuang sampah ini banyak orang yang*

kurang mampu juga, dia gak mampu bayar iuran sampah, lalu kalau kita kenakan denda pakai apa dia mau bayar dendanya.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan berbanding terbalik dengan yang disampaikan di atas, berdasarkan wawancara penulis dengan seorang warga yang tidak jauh tinggalnya dari TPS ilegal di Jl. karya 1 yang bernama ibu Ria, berdasarkan pengakuan beliau adalah *selam ibu tinggal disini sudah puluhan tahun belum pernah orang DLHK datang untuk melarang orang membuang sampah disitu kecuali dua minggu lalu ada dari mobil sampah dari provinsi Riau yang mengangkut sampah disitu lalu dia memasang spanduk disitu untuk dilarang membuang sampah disitu, itu pun setelah tempat itu di tinggal dan dipasang polis line tapi tetap aja yang buang sampah disitu.*

Maka dapat di simpulkan memang sudah ada pemasangan spanduk dilakukan oleh orang DLHK namun masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan di TPS yang resmi, sehingga wajar hari demi hari ada saja TPS ilegal baru yang meresahkan pemukiman masyarakat, namun kalau untuk penutupan TPS resmi supaya orang luar yang ikut membuang sampah disitu itu tindakan yang sudah bagus dari pandangan penulis, maka inilah juga yang seharusnya jadi pusat perhatian dan juga harus menjalankan tugas utama bagi pegawai DLHK untuk mengawasi TPS di sekitar kec. Marpoyan damai, maka dari indikator ini prosedur ini dapat penulis simpulkan cukup terlaksana DLHK dalam mengawasi TPS di Kecamatan Marpoyan damai.

Standar

Adanya batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam melakukan sebuah pekerjaan yang tentu perlunya memiliki perencanaan yang matang sehingga mencapai tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan wawancara dengan Kadis DLHK bapak Darussalam, S.IP.,M.IP *dalam mengerjakan suatu pekerjaan supaya teratur maka kita harus punya SOP yang perlu kita ikuti supaya ada target yang harus kita capai terutama dalam melakukan pengawasan di lapangan terkait dengan oknum yang membuang sampah sembarangan di membuat tercemarnya lingkungan, walaupun kita tertibkan sudah kita buat Standar yang jelas tapi tentu pasti ada penolakan baik dari internal ataupun eksternal, seperti susah nya karyawan untuk menyesuaikan jika ada kebijakan baru yang, dari lingkungan masyarakat juga sering dapat penolakan seperti dari petugas sudah memasang baliho dilarang membuang sampah tapi ada oknum yang mengambil bahkan menyobek spanduk yang kami pasang.*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Darmawan, SE dalam melaksanakan pekerjaan beliau mengatakan *dalam melaksanakan pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru menjalankan perannya sebagaimana mestinya, dan bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga seperti melakukan pengawasan pada TPS di sekitar Kec. Marpoyan Damai, supaya tidak ada oknum yang membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya yang akan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan, maka perlunya Standar yang perlu kita ikuti.*

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan bahwa standar yang di buat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kota Pekanbaru memang sudah memang sudah bagus dari segi konseptualnya, namun untuk penerapannya masih jauh dari kata sempurna dalam menerapkan SOP karena sejauh ini belum ada yang di denda ataupun di kenakan sanksi bagi yang membuang sampah tidak di TPS, maka dapat di simpulkan masih kurang terlaksana DLHK Pekanbaru dalam menerapkan pengawasan dari indikator standar yang telah di buat.

Ketelitian

Adanya pengukuran kerja pegawai, dalam penilaian ini yang perlu di perhatikan adalah ketelitian saat dalam mengawasi TPS yang resmi dan tidak resmi sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang di lakukan oleh setiap petugas yang ada di lapangan, serta memperhatikan dampak dari aturan yang di ambil.

Berdasarkan wawancara dengan Kadis DLHK bapak Darussalam, S.IP.,M.IP *dalam mengerjakan suatu pekerjaan maka selalu memperhatikan keselamatan kerja supaya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal, karna jika pekerjaan tidak menggunakan sepi contoh seperti pelindung kepala dan lain sebagainya maka jika ada yang menimpa saat kerja di lapangan maka akan fatal akibatnya, dan juga dalam mengambil suatu keputusan harus selalu memperhatikan dampak yang di timbulkan supaya tidak ada yang di rugikan.*

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Wahyu Darmawan, SE selaku kepala bidang pengelolaan sampah dan kebersihan mengatakan *dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di lapangan pegawai yang bertugas di lapangan harus selalu memperhatikan keselamatan serta sepi dengan perlengkapan keamanan baik buru yang bagian membersihkan sampah di tiap TPS maupun yang mengapa di jalanan dan intinya dibidang kebersihan yang ada di Kec. Marpoyan damai, supaya terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, selalu menggunakan perlindungan tangan, sepatu bot dan menggunakan masker saat melakukan kerja di lapangan.*

Dalam menjalankan tugas juga petugas yang melakukan pengawasan selalu memperhatikan manfaat bagi masyarakat yang tentunya seperti penertiban oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan selokan dan drainase, itu tujuannya tentu demi terhindarnya dari banjir, selokan tersumbat serta lingkungan tetap bersih dari sampah.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan semua yang di sampaikan oleh kepada bagian pengelolaan sampah di atas sudah menjalankan di lapangan yaitu sudah terlaksananya K3 yang di terapkan saat petugas melakukan kerja di lapangan, sudah memakai masker, sepatu dan sarung tangan dan lainnya, namun untuk melakukan pemantauan dan langsung untuk melarang orang membuang sampah ke pinggir jalan itu masih kurang menurut penulis, bahkan konsekuensi bagi yang membuang sampah sembarangan masih belum diterapkan, sehingga belum ada jerahnya bagi yang membuang sampah sembarangan tersebut, maka dapat di simpulkan sudah cukup terlaksana DLHK Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terkait dengan indikator ketelitian ini.

Pengukuran pekerjaan

Adanya evaluasi pekerjaan pegawai sejauh mana pekerjaan yang di lakukan perlu adanya perbaikan atau mensupor peningkatan kualitas atau perbaikan sistem yang harus di lakukan, demi kemajuan suatu organis, demi tercapainya tujuan instansi itu sendiri, serta kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kadis DLHK bapak Darussalam, S.IP.,M.IP *sejauh ini sudah jauh nampah perubahan demi perubahan yang diupayakah oleh DLHK untuk mengurangi dampak dari pembuangan sampah sembarangan, karna sudah aktifnya pengawasan bagi yang membuang sampah di pinggir jalan bahkan di drainase air yang mengakibatkan tersumbatnya parit sekitar kecamatan kota Pekanbaru.*

Dalam wawancara penulis dengan bapak Wahyu Darmawan, SE, beliau mengatakan *sejauh ini untuk yang seperti kita lihat dari tahun ketahunnya sudah mulai ada perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Pekanbaru yaitu dari pihak DLHK untuk melakukan penertiban atau melakukan pengawasan terkait sampah ini, namun karena tumbuh kembangnya*

penduduk yang juga sangat pesat, menyebabkan perlu penambahan anggota atau personil dalam menanggulangi sampah ini khususnya di marpoyan damai, sehingga tentu tidak hanya hasil yang maksimal yang perlu di tuntut dari kinerja pemerintah, yang utama itu adalah kesadaran masyarakat yang perlu ditumbuhkan dalam diri masing-masing masyarakat kita, jika masyarakat kita sudah sadar akan membuang sampah sembarangan itu akan berimbas pada dirinya sendiri ataupun orang banyak maka saya rasa tidak perlu lagi ada yang namanya pengawasan.

Berdasarkan pengamatan penulis memang benar adanya bahwa sampah yang berserakan, dibuang pinggir jalan, sungai bahkan drainase air pun itu sebenarnya adalah kurangnya kesadaran akan bahannya yang di timbulkan oleh sampah ini, setidaknya bagi diri kaitan pribadi jika kita tidak bias membersihkan lingkungan maka seperti yang dilakukan oleh para petugas kebersihan setiap harinya hendaknya kita buanglah sampah ke tong sampah, supaya lingkungan kita tetap terjaga dan terhindar dari banjir dan bencana akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan DLHK telah cukup terlaksana dalam melakukan pengawasan dari segi pengukuran pekerjaan.

Perbaikan

Adanya koreksi pekerjaan dari pimpinan atau atasan yang di buat agar suatu pekerjaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga memberikan konsekuensi bagi yang tidak menaati pekerjaan dan program yang di buat demi kemajuan suatu yang diinginkan tercapai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kadis DLHK beliau mengatakan *proses dalam menanggulangi sampah di Pekanbaru ini cukup terbilang lumayan susah untuk mengatasinya, tapi kembali lagi bahwa oknum yang membuang sampah sembarangan ini terlalu kreatif menurut saya untuk membuat TPS masing-masing sehingga menambah tugas DLHK Pekanbaru untuk membersihkannya karena terlalu banyak TPS liar yang beredar di jalanan yang ada di kecamatan marpoyan damai khususnya, intinya kalau ada aja 1 kantong sampah yang dibuang sama 1 orang maka di hari berikutnya akan ada menyusul sampah dari orang lain yang ikut menumpuk sampah di tempat yang sama, jadi seolah-olah seperti semut yang dapat gula, kalau semut satu ekor lalu dia dapat 1 ongkok gula pasti semut yang lain akan datang dengan sendirinya tanpa ada yang mengundang untuk makan disitu, seperti itu jugalah sama halnya dengan orang yang membuang sampah dipinggir jalan itu, dan sejauh ini DLHK sudah berusaha memaksimalkan pengawasan dan menertibkan TPS- TPS yang tidak resmi ini bahkan setiap ada yang kami temukan TPS baru yang ilegal kami berusaha memasang himbauan agar tidak membuang sampah di tempat itu, namun untuk konsekuensi ini sendiri belum maksimal kami terapkan karna keterbatasan personil kami dalam pengawasan TPS ilegal ini.*

Dalam wawancara penulis dengan bapak Wahyu Darmawan, SE, beliau mengatakan *pencapaian dari pengawasan TPS ini tentu menimbulkan efek yang cukup signifikan yang menyebabkan berkurangnya TPS liar yang ada dipinggir jalan, namun sebenarnya kurang kesadaran dari masyarakat ini terhadap menjaga kebersihan lingkungan jadi disinilah kekurangan yang sangat di sayangkan dan menjadi pekerjaan ekstra bagi petugas dalam menertibkannya, terkait dengan konsekuensi dalam hal ini dari kami sangat sulit untuk menerapkannya terlebih lagi belum ada suport dari gubernur, jika memang ada maka kami rasa akan sayang bias membantu penertiban TPS liar ini*

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan terkait dengan jawaban dari kadis DLHK diatas memang benar adanya memang sebagian sudah dilakukan penertiban terhadap TPS ilegal hal ini juga kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk hidup bersih dan membuang sampah pada tempatnya, terkait dengan sanksi belum ada orang yang membuang sampah sembarangan yang belum dikenakan sanksi sesuai dengan perda yang

berlaku, jadi menurut penulis dari DLHK belum melaksanakan sanksi kepada oknum membuang sampah sembarangan ini sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku, maka dalam hal ini penulis menyimpulkan DLHK kurang terlaksana dalam melakukan pengawasan dari indikator perbaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa pengaruh pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai) penulis akan memberikan berada kategori sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian Pengaruh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai) yang dilihat dari indikator diatas diantara-Nya adalah:

1. Prosedur berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat sekitar TPS lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana.
2. Standar berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat sebaran TPS juga lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana.
3. Ketelitian berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat sebaran TPS juga lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana.
4. Pengukuran Pekerjaan berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat sebaran TPS juga lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana.
5. Perbaikan berada pada tanggapan pegawai Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan rata- rata menjawab cukup terlaksana dan dari Masyarakat sebaran TPS juga lebih banyak yang menjawab cukup terlaksana.

Maka dari hasil indikator yang lima yang di ajukan tersebut dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pengaruh Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Pada Sebaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Kota Pekanbaru (Di Kecamatan Marpoyan Damai) dapat disimpulkan berada pada kategori cukup terlaksana.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Awang, Azam. 2012. Pengembangan Organisasi Kajian Pemekaran Kecamatan. Bandung, CV IndrPa Prahasta.
- Amiruddin idris, Engantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Bajamin Bukti, ddk., Pembangunan Sumberda Daya Manusia (Teori dimensi pengukuran dan implementasi dan organisasi, (Yogyakarta: zahir publishing, 2017)
- Edy Sutrisno, Menejemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Iswandir. 2015. Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi, Bandung, Alfabeta
- Keban, T.Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,. Teori dan Isu . Gava Media. Yogyakarta.

- Nurmasari. Zulkifli. 2015. Pengantar Manajemen. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Pasolong, Hardani. 2008. Teori Administrasi Publik. Makassar. Cv. Alfabeta
- Saefullah, Kurniawan. Trisnawati, Sule, Erni. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta, Prenada Media.
- Schermerhorn. 2002. Pengawasan Dalam Manajemen. Jakarta: Bina Aksara
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta, Erlangga
- Siagian, Sondang, P. 2003. Administrasi Pembangunan. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Siagian, Sondang, P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Binapura Aksara
- Siagian, Sondang, P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara
- Siswanto. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siswanto. 2013. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudaryono, 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Sedarmayan, Manajemen Sumber daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan menejmen pegawai sipil, (Bandung: PT. Rifea Aditama, 2007)
- Sufian.2003. Administrasi, Organisasi dan Manajemen, Suatu Ilmu TeoriKonsep Aplikasi. Pekanbaru, UIR Press
- Sugiono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Inu, Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Bandung, PT Bumi Aksara.
- Terry, R, George. 2009. Prinsip-Prinsip Menejemen. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Mifta. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta, Prenada Gramedia Group.
- Tjokroamidjojo, Bintoro.2013. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta,PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Wirawa, Evaluasi kinerja sumber daya manusia Teori, Aplikasi, dan penelitian, (Jakarta Salemba Empat, 2015)
- Winardi. 2011. Teori Organisasi Dan Pengorganisasian. Jakarta: Rajawali Pers
- Yussa, Tarmizi dan Andri, Hendri. 2015. Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisng.
- Zulkifli. 2013. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru, Fisipol UIR
- Zulkifli. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru,UIR Press.
- Zulkifli, dan Yogia, Adidi, Moris. 2014. Fingsi Fungsi Manajemen, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publisng (2014), h. 358
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. Jurnal Administrasi Publik, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. Jurnal Administrasi Publik, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 152-155). Atlantis Press.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana*

- Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.

- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Sosio Konsepsia, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). Jurnal Wacana, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. Gema Publica, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. Jurnal Niara, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In International Conference on Public Organization (ICONPO 2021) (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). VALUTA, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. Jurnal Bina Praja, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction

- Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science*, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".